

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2013-2018

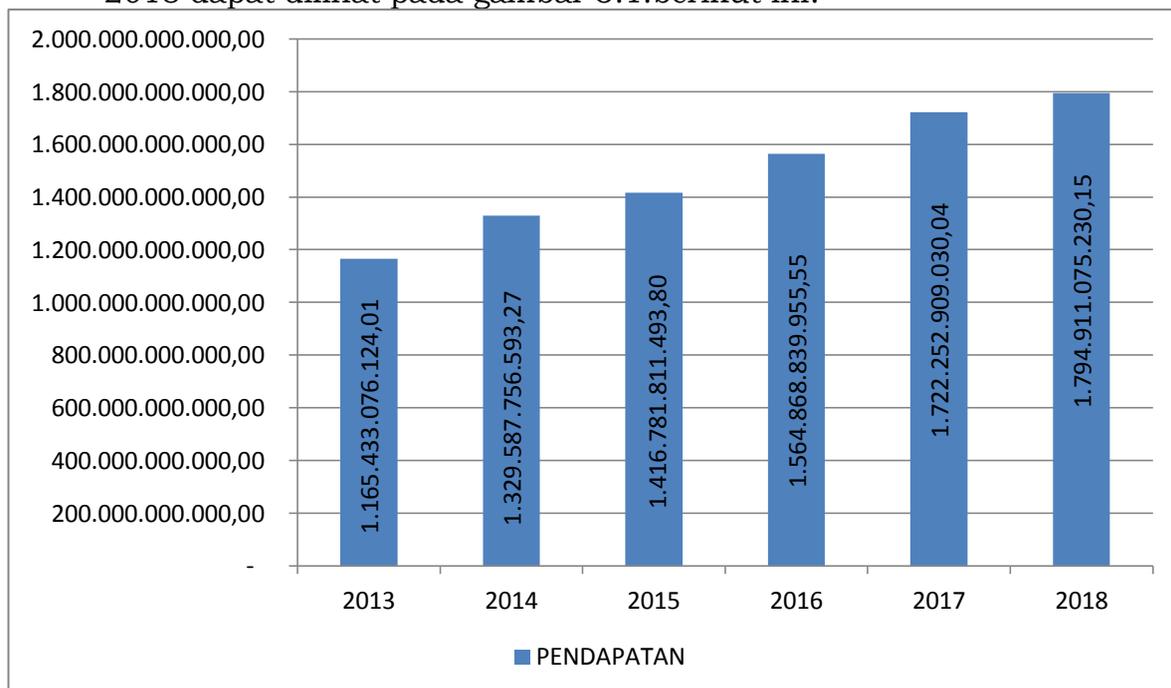
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Data realisasi keuangan daerah Kabupaten Rembang tahun 2013-2018 perlu disampaikan untuk memberikan gambaran kinerja realisasi APBD tahun 2013-2018 dan dapat dipergunakan sebagai dasar analisis, mencakup analisis kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Analisis kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang periode 2013 sampai dengan 2018 dilihat dari berbagai sudut pandang diuraikan sebagai berikut:

1. Pendapatan

Pendapatan daerah selama tahun 2013 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2013 pendapatan daerah Kabupaten Rembang sebesar Rp 1.165.433.076.124,00,-. Pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp. 1.329.587.756.593,27,-, selanjutnya pada tahun 2015 juga mengalami peningkatannya menjadi Rp 1.416.781.811.493,80,-. Pada tahun 2016 meningkat menjadi sebesar Rp 1.564.868.839.955,55,- pada tahun 2017 kembali mengalami peningkatan menjadi Rp 1.722.252.909.030,04,- dan selanjutnya mengalami peningkatan hingga pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp. 1.794.911.075.230,15,-

Grafik Perkembangan pendapatan daerah selama tahun 2013-2018 dapat dilihat pada gambar 3.1. berikut ini:

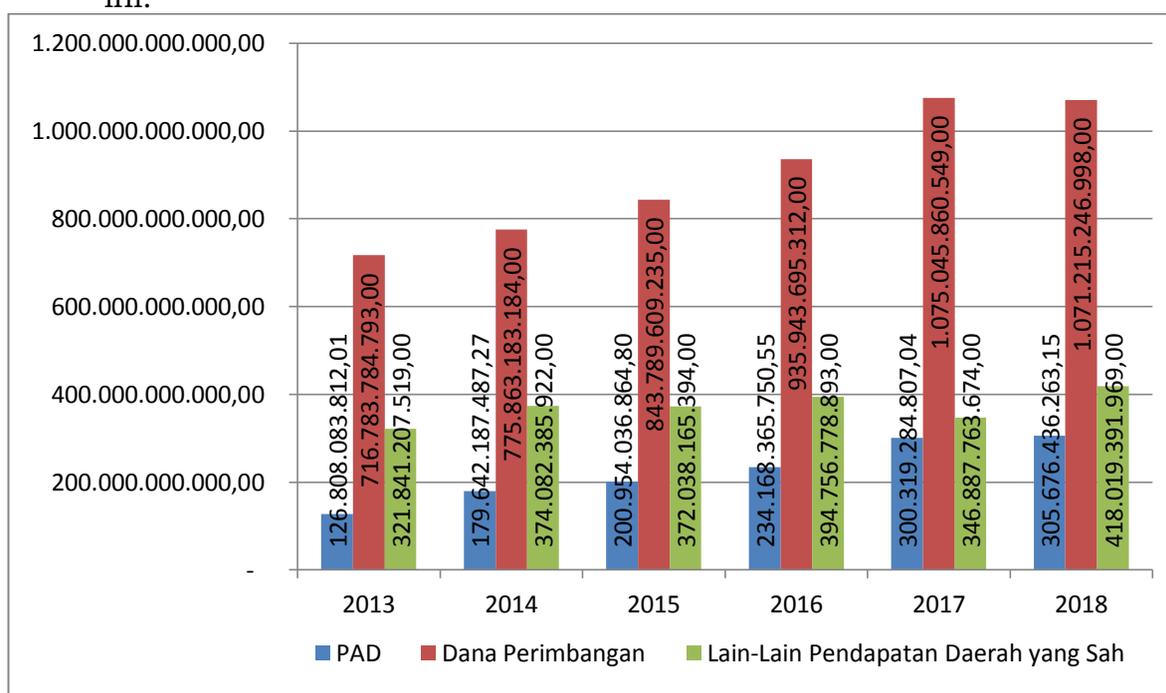


Grafik 3.1
Perkembangan Pendapatan Daerah
Tahun 2013-2018

Sumber: BPPKAD Kabupaten Rembang 2018

Gambaran perkembangan secara nominal masing-masing sumber pendapatan menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 PAD sebesar Rp. 126.808.083.812,01,-, pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp. 179.642.187.487,27,-, pada tahun 2015 PAD mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 200.954.036.864,80,-. Pada tahun 2016 meningkat lagi menjadi sebesar Rp. 234.168.365.750,55,-, pada tahun 2017 menjadi Rp. 300.319.284.807,04,- dan pada tahun 2018 menjadi Rp. 305.676.436.263,15,-. Sementara itu peningkatan pendapatan dari Dana Perimbangan tidak begitu besar secara nominal.

Grafik Perkembangan masing-masing sumber pendapatan daerah selama tahun 2013-2018 dapat dilihat pada gambar 3.2. berikut ini.

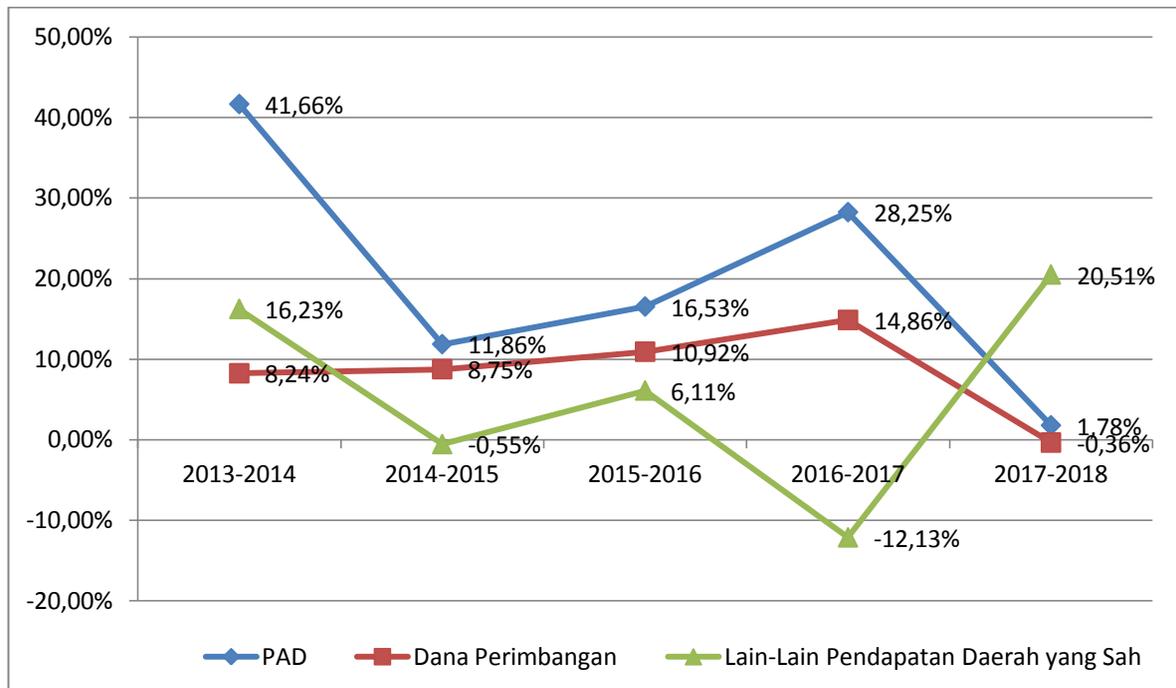


Grafik 3.2
Perkembangan Masing-Masing Unsur Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018

Sumber: BPPKAD Kabupaten Rembang 2018

Berdasarkan data di atas masing-masing sumber pendapatan daerah dalam APBD selama enam tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup stabil. Sumber pendapatan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), perkembangan selama kurun waktu 2013-2018 rata-rata tumbuh sebesar 20,02%, dengan persentase pertumbuhan cenderung meningkat. Sumber pendapatan daerah dari dana perimbangan selama kurun waktu 2013-2018 juga mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,48%. Sumber pendapatan yang berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah juga mengalami peningkatan. Secara rata-rata sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 6,03%. Pertumbuhan PAD tertinggi terjadi pada tahun 2014 mencapai 41,66%. Kinerja pertumbuhan sumber pendapatan daerah dari lain-lain pendapatan yang sah selama tahun 2013-2018 fluktuatif.

Grafik pertumbuhan masing-masing sumber pendapatan terlihat pada Gambar 3.3 berikut:



Grafik 3.3
Pertumbuhan Masing-Masing Unsur Pendapatan
Tahun 2013-2018 (%)

Sumber: BPPKAD Kabupaten Rembang 2018

Secara rinci rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Rembang tahun 2013-2018 disajikan pada Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1.
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018

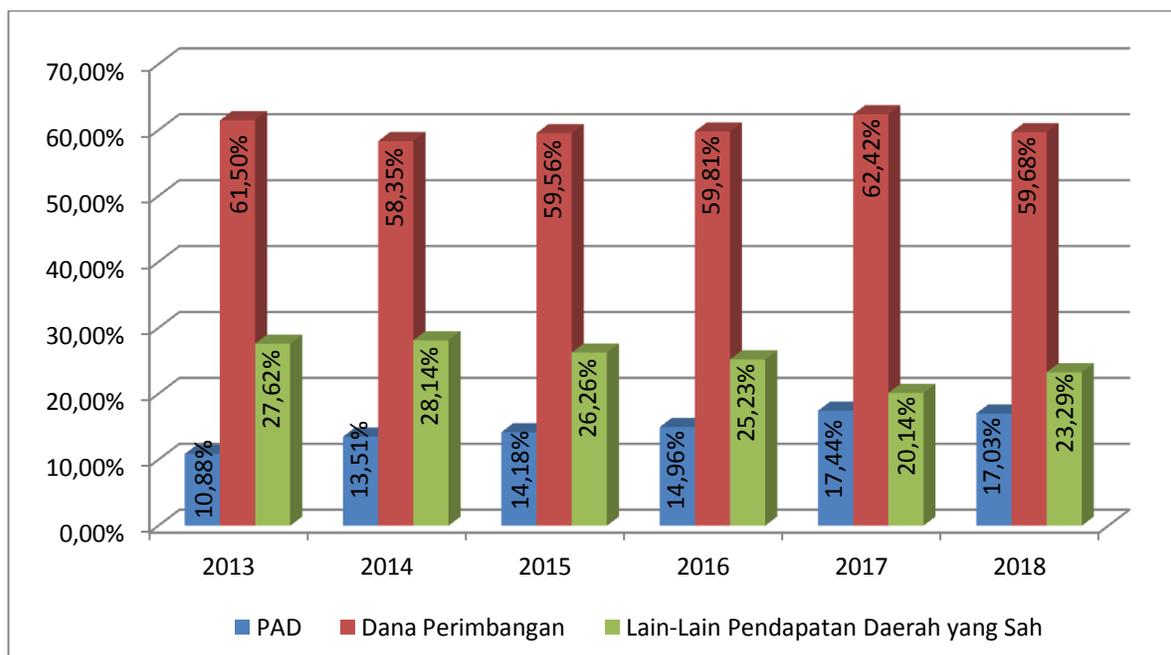
No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018 Unaudited	% R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PENDAPATAN	1,165,433,076,124.01	1,329,587,756,593.27	1,416,781,811,493.80	1,564,868,839,955.55	1,722,252,909,030.04	1,794,911,075,230.15	9.07%
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	126,808,083,812.01	179,642,187,487.27	200,954,036,864.80	234,168,365,750.55	300,319,284,807.04	305,676,436,263.15	20.02%
	Pendapatan Pajak Daerah	34,067,851,784.00	38,643,241,316.00	42,306,265,606.00	48,420,954,850.00	59,734,946,872.00	100,438,352,553.00	25.77%
	Hasil Retribusi Daerah	30,924,102,833.00	41,529,546,666.00	32,230,052,368.00	23,985,514,302.50	20,730,064,301.00	21,441,590,432.00	-4.76%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,277,635,260.00	6,183,205,661.00	4,447,117,385.00	6,564,459,237.00	9,212,738,532.00	18,775,303,058.00	50.46%
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	58,538,493,935.01	93,286,193,844.27	121,970,601,505.80	155,197,437,361.05	210,641,535,102.04	165,021,190,220.15	26.28%
2	DANA PERIMBANGAN	716,783,784,793.00	775,863,183,184.00	843,789,609,235.00	935,943,695,312.00	1,075,045,860,549.00	1,071,215,246,998.00	8.48%
	Dana Transfer Umum	674,684,874,793.00	729,657,183,184.00	745,370,201,235.00	828,385,043,312.00	816,948,229,807.00	812,596,054,494.00	3.91%
	Dana Transfer Khusus	42,098,910,000.00	46,206,000,000.00	98,419,408,000.00	107,558,652,000.00	258,097,630,742.00	258,619,192,504.00	54.44%
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	321,841,207,519.00	374,082,385,922.00	372,038,165,394.00	394,756,778,893.00	346,887,763,674.00	418,019,391,969.00	6.03%
	Pendapatan Hibah	74,995,000.00	541,721,500.00	138,351,272.00	1,488,856,904.00	1,711,800,674.00	56,967,950,020.00	953.39%
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	55,168,716,988.00	72,995,869,203.00	93,284,137,342.00	81,133,459,989.00	92,803,709,000.00	105,216,144,949.00	14.97%
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	150,500,902,000.00	172,399,233,000.00	268,241,945,000.00	286,903,900,000.00	228,013,715,000.00	229,010,130,000.00	11.40%
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	116,096,593,531.00	128,145,562,219.00	10,373,731,780.00	25,230,562,000.00	24,358,539,000.00	26,825,167,000.00	13.67%

Sumber : BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018

Pada tahun 2015, pendapatan dari pos Retribusi Daerah mengalami penurunan karena ada pengalihan pendapatan dari PPK BLUD Puskesmas yaitu berupa Kapitasi dari Jaminan Kesehatan Nasional masuk pada pos pendapatan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, pendapatan tersebut sebelumnya merupakan pos retribusi daerah. Pada tahun 2016 dan 2017 pos retribusi mengalami penurunan cukup tajam dan pos pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada tahun 2013 s/d tahun 2017 mengalami pertumbuhan sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan yang tajam dikarenakan pada tahun 2017 Pendapatan Hibah Dari Dana BOS yang semula berada pada pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, pada tahun 2018 dipindah pada pos Pendapatan Hibah pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Proporsi masing-masing sumber pendapatan terhadap total APBD dapat dijelaskan bahwa untuk PAD, proporsi PAD terhadap total APBD dari tahun 2013-2018 meningkat. Pada tahun 2013 proporsi PAD terhadap total APBD sebesar 10,88% dan pada tahun 2018 proporsi PAD terhadap total APBD sebesar 17,03%. Sedangkan untuk proporsi pendapatan dari Dana Perimbangan selama kurun waktu 2013-2018 grafik peningkatannya mengalami penurunan walaupun secara nominal meningkat. Pada tahun 2013 proporsi Dana Perimbangan terhadap total APBD sebesar 61,50% dan pada tahun 2018 menjadi sebesar 59,68%, Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat sedikit berkurang. Demikian juga untuk pendapatan yang bersumber dari lain-lain Pendapatan yang Sah, Proporsi sumber pendapatan dari Pos Lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap total APBD pada tahun 2013 sebesar 27,62%, dan pada tahun 2018 menurun menjadi 23,29%.

Secara rinci Grafik perkembangan proporsi masing-masing sumber pendapatan selama tahun 2013-2018 dapat dilihat pada gambar 3.4 berikut ini:



Grafik 3.4
Perkembangan Proporsi Masing-Masing Unsur Pendapatan
Terhadap Total Pendapatan Daerah
Tahun 2013-2018 (%)

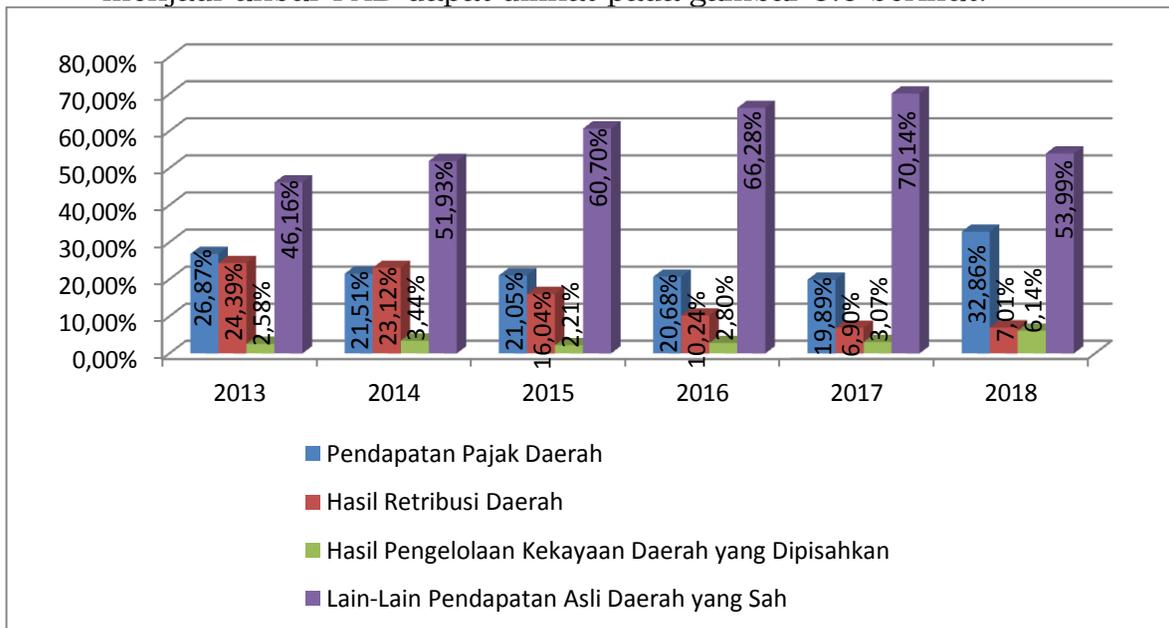
Sumber: BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rembang mengalami peningkatan selama enam tahun terakhir. Pendapatan Asli Daerah berasal dari empat sumber pendapatan yaitu (1) Pendapatan Pajak Daerah, (2) Pendapatan Retribusi Daerah, (3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Hingga saat ini PAD Kabupaten Rembang sebagian besar berasal dari pos Lain-lain PAD yang sah. Rata-rata proporsi Lain-lain PAD yang sah selama enam tahun terakhir sebesar 58,20% dari total PAD. Pos PAD terbesar kedua adalah Pendapatan Pajak Daerah, proporsi Pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Rembang rata-rata selama enam tahun sebesar 23,81% dari PAD.

Selanjutnya pos pendapatan PAD terbesar ketiga adalah Pendapatan Retribusi Daerah, rata-rata proporsi sumber pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Retribusi Daerah selama enam tahun terakhir sebesar 14,62%. Selama tahun 2013-2018, proporsi Pajak Daerah terhadap total PAD mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 proporsi Pajak Daerah adalah sebesar 26,87% dan pada tahun 2018 menjadi sebesar 32,86%.

Komponen PAD yang mempunyai kontribusi paling rendah terhadap PAD di Kabupaten Rembang adalah Pendapatan yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Komponen ini juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 komponen Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan mempunyai proporsi terhadap PAD sebesar 2,58%, kemudian semakin meningkat menjadi 6,14% pada tahun 2018. Secara rata-rata proporsi Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD adalah sebesar 3,38% per tahun.

Grafik Perkembangan proporsi masing-masing pos yang menjadi unsur PAD dapat dilihat pada gambar 3.5 berikut:



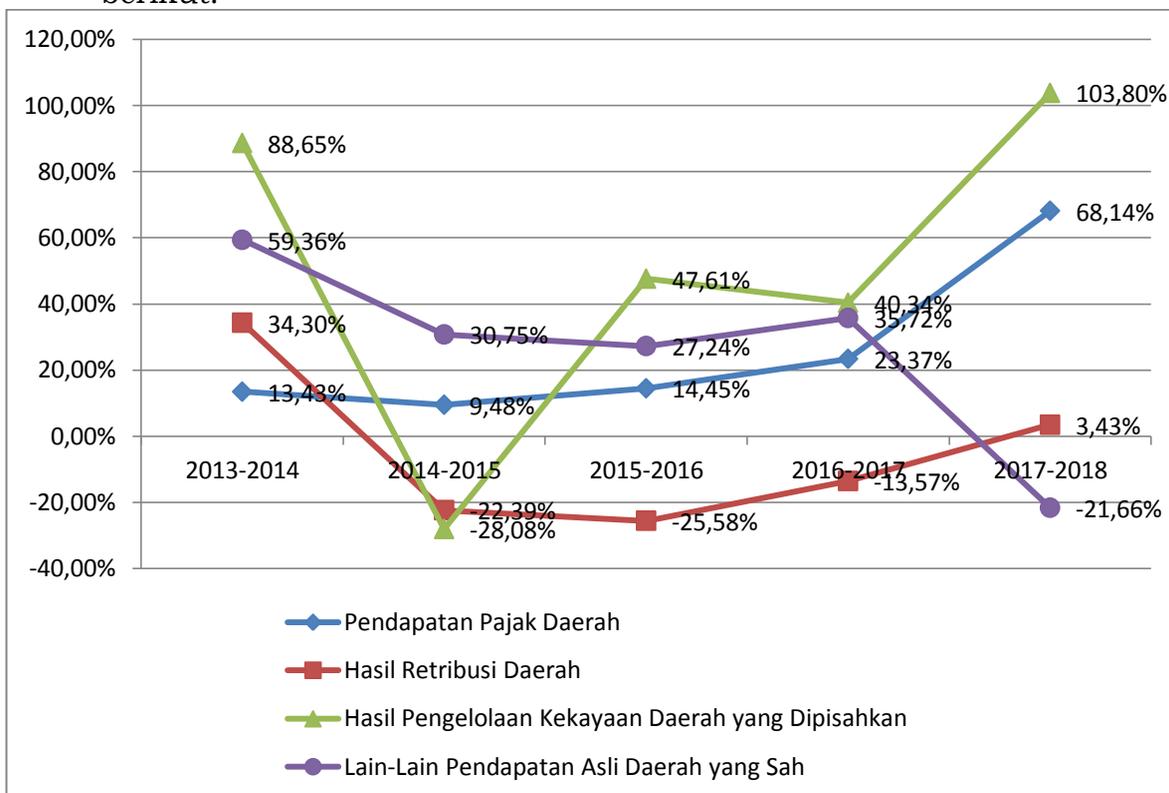
Grafik 3.5
Proporsi Masing-Masing Unsur PAD
Tahun 2013-2018 (%)

Sumber: BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018

Pertumbuhan masing-masing komponen dalam Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 fluktuatif. Dari keempat komponen PAD yang terdiri dari (1) Pendapatan Pajak Daerah, (2) Pendapatan Retribusi Daerah, (3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, menunjukkan bahwa pertumbuhan Rata-rata Pendapatan pajak daerah selama enam tahun terakhir sebesar 25,77% per tahun. Rata-rata pertumbuhan komponen Retribusi Daerah menurun sebesar -4,76%.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mempunyai nilai rata-rata pertumbuhan tertinggi sebesar 50,46% per tahun Sedangkan komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah mempunyai nilai rata-rata pertumbuhan sebesar 26,28%.

Pertumbuhan komponen Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada tahun 2014 mempunyai pertumbuhan paling tinggi sebesar 88,65%. Secara rinci Grafik pertumbuhan masing-masing komponen PAD terlihat pada Gambar 3.6 berikut:



Grafik 3.6
Pertumbuhan Masing-Masing Komponen PAD
Tahun 2013-2018 (%)

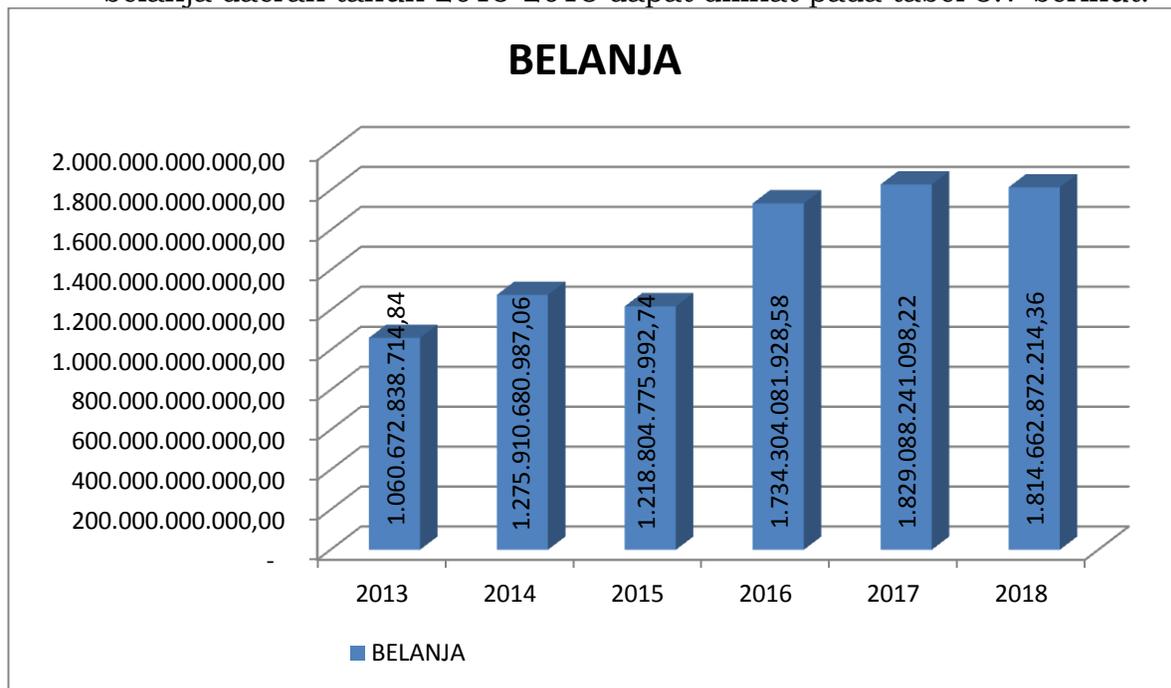
Sumber: BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018

2. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan salah satu komponen kebijakan keuangan daerah dalam alokasi anggaran. Pengalokasian anggaran yang tepat mengarah pada skala prioritas diharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi daerah. Kebijakan dalam penetapan alokasi belanja pembangunan tidak bisa terlepas dari perhitungan kebutuhan rutin yang harus dipenuhi, meliputi belanja pegawai, belanja pemeliharaan, belanja operasional.

Besarnya belanja daerah di Kabupaten Rembang selama enam tahun terakhir juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2013

besarnya belanja sebesar Rp. 1.060.672.838.714,84, pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp. 1.814.662.872.214,36,- Apabila dikaitkan dengan Tabel 3.1 tentang Besarnya Pendapatan, maka pada tahun 2013 sampai dengan 2015 belanja lebih kecil dari totalpendapatan sehingga selalu terjadi surplus. Sedangkan pada tahun 2016 sampai dengan 2018, terjadi defisit anggaran. Selengkapnya grafik perkembangan belanja daerah tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut:



Grafik 3.7
Perkembangan Belanja Daerah
Tahun 2013-2018 (Rupiah)

Sumber: BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018

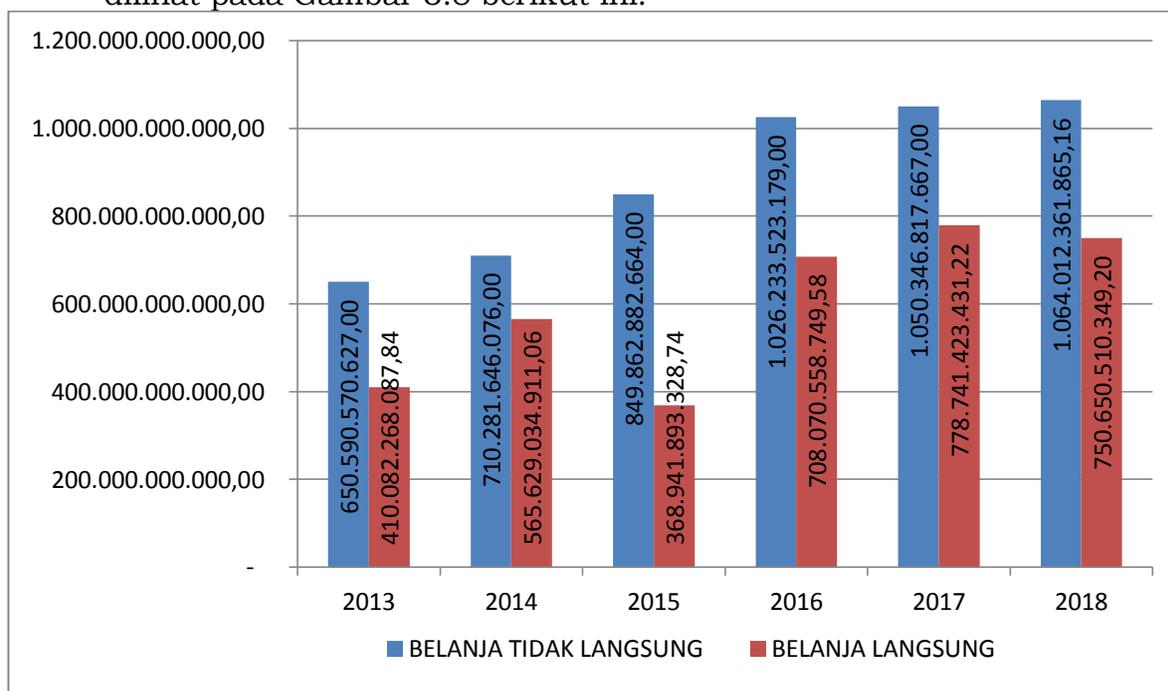
Secara rinci rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah Kabupaten Rembang tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018 Unaudited	% R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	BELANJA	1,060,672,838,714.84	1,275,910,680,987.06	1,218,804,775,992.74	1,734,304,081,928.58	1,829,088,241,098.22	1,814,662,872,214.36	12.56%
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	650,590,570,627.00	710,281,646,076.00	849,862,882,664.00	1,026,233,523,179.00	1,050,346,817,667.00	1,064,012,361,865.16	10.65%
	Belanja Pegawai	572,841,155,868.00	632,727,603,459.00	661,607,200,077.00	695,202,128,818.00	622,547,261,167.00	648,104,050,822.16	2.75%
	Belanja bunga	20,708,119.00	14,340,417.00	7,985,987.00	1,605,011.00	-	1,468,870,443.00	-63.74%
	Belanja Hibah	42,862,476,900.00	39,727,269,200.00	23,873,745,800.00	27,269,005,350.00	46,450,880,000.00	55,764,388,000.00	11.48%
	Belanja Bantuan Sosial	1,800,500,000.00	2,552,273,000.00	2,714,000,000.00	7,446,000,000.00	8,927,000,000.00	8,333,700,000.00	47.14%
	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	-	-	6,157,224,400.00	6,455,961,000.00	6,437,223,500.00	10,765,819,900.00	23.93%
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	32,688,824,740.00	35,163,035,000.00	155,502,726,400.00	289,842,093,000.00	365,168,845,000.00	339,575,532,700.00	91.03%
	Belanja Tidak Terduga	376,905,000.00	97,125,000.00	-	16,730,000.00	815,608,000.00		1125.22%
2	BELANJA LANGSUNG	410,082,268,087.84	565,629,034,911.06	368,941,893,328.74	708,070,558,749.58	778,741,423,431.22	750,650,510,349.20	20.29%
	Belanja Pegawai	61,041,654,893.00	86,882,064,160.00	113,995,499,657.00	144,564,120,169.00	174,582,051,301.00	177,564,307,707.00	24.57%
	Belanja Barang dan Jasa	213,592,815,850.84	327,292,056,989.06	202,965,666,652.74	217,960,717,279.58	250,388,658,063.00	263,637,696,747.20	8.56%
	Belanja Modal	135,447,797,344.00	151,454,913,762.00	51,980,727,019.00	345,545,721,301.00	353,770,714,067.22	309,448,505,895.00	100.15%

Sumber : BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018

Selanjutnya untuk Grafik Perkembangan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Gambar 3.8 berikut ini:

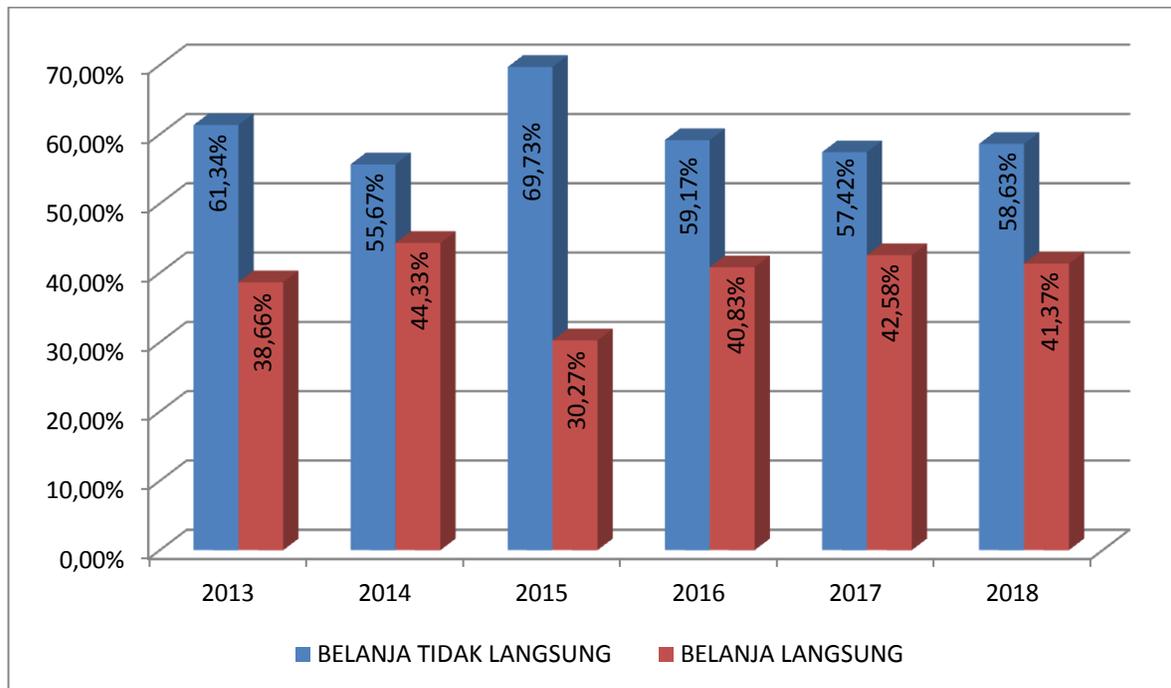


Grafik 3.8
Perkembangan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 (Rupiah)

Sumber : BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018

Dilihat dari proporsinya, Belanja Daerah selama kurun waktu tahun 2013-2018 terjadi fluktuasi proporsi masing-masing unsur belanja terhadap total belanja daerah. Proporsi belanja Langsung terhadap total belanja daerah fluktuatif dari sebesar 38,66% pada tahun 2013 menjadi sebesar 41,37% pada tahun 2018. Angka proporsi tertinggi belanja langsung terhadap total belanja terjadi pada tahun 2014 sebesar 44,33%. Kecenderungan peningkatan proporsi Belanja Langsung menunjukkan adanya komitmen pemerintah Kabupaten Rembang untuk meningkatkan kemajuan pembangunan daerah.

Secara rinci Grafik proporsi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap total Belanja Daerah dapat dilihat pada gambar 3.9.



Grafik 3.9
Perkembangan Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kabupaten Rembang terhadap Total Belanja Daerah Tahun 2013-2018 (%)

Sumber : BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018

Salah satu ukuran kualitas belanja yang baik adalah dengan semakin besarnya porsi Belanja Langsung terhadap total belanja daerah. Belanja Langsung yang besar diharapkan akan memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah dan pada akhirnya akan meningkatkan potensipenerimaan daerah yang baru. Rasio Belanja Langsung terhadap total belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk pembangunan daerah. Belanja Langsung, merupakan belanja pemerintah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah selain dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya, semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin buruk pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali. Dalam penganggaran pemerintah daerah pembiayaan daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara itu pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

Dalam kurun waktu tahun 2013-2018 penerimaan pembiayaan daerah menunjukkan fluktuatif. Dari sebesar Rp.67.555.128.713,17,-

pada tahun 2013 menjadi Rp.108.161.445.444,40,- pada tahun 2018. Pengeluaran pembiayaan daerah menunjukkan fluktuatif. Pada tahun 2013 Pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp.5.253.450.842,00,- menjadi sebesar Rp.12.717.627.920,00,- pada tahun 2018. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menurun dari sebesar Rp.167.061.915.280,34,- pada tahun 2013 menjadi Rp.75.692.020.540,19,- pada tahun 2018.

Secara rinci rata-rata perkembangan realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Rembang tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Tabel 3.3.

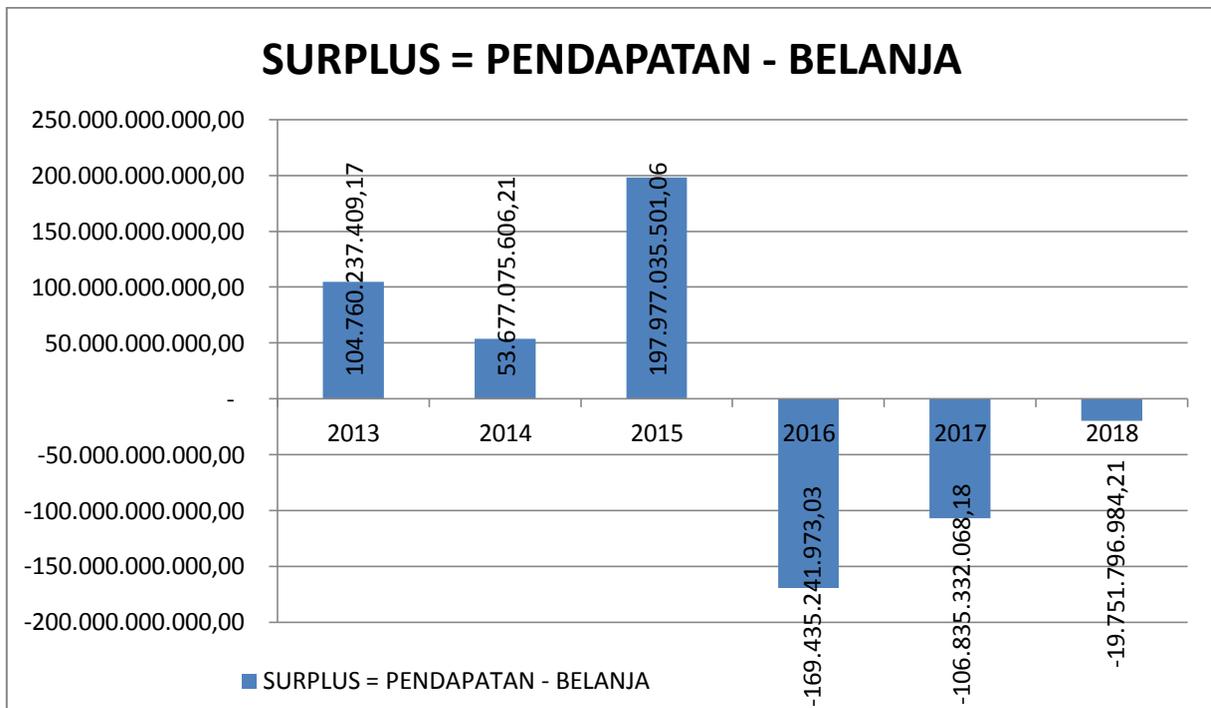
Tabel 3.3.
Rata-Rata Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018 Unaudited	% R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C	PEMBIAYAAN DAERAH							
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	67,555,128,713.17	167,066,868,874.34	209,301,180,147.55	396,607,873,805.61	232,225,166,662.58	108,161,445,444.40	33.44%
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	67,555,128,713.17	167,066,868,874.34	209,301,180,147.55	396,607,873,805.61	214,495,185,982.58	108,161,445,444.40	33.32%
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	17,729,980,680.00	-	
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5,253,450,842.00	11,162,450,842.00	10,670,450,843.00	12,296,725,422.00	8,228,389,150.00	12,717,627,920.00	28.96%
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5,200,000,000.00	11,109,000,000.00	10,617,000,000.00	12,270,000,000.00	8,189,000,000.00	10,422,000,000.00	23.76%
	Pembayaran Pokok Utang	53,450,842.00	53,450,842.00	53,450,843.00	26,725,422.00	39,389,150.00	2,256,548,000.00	1125.25%
	Restitusi atas kelebihan penetapan Pajak	-	-	-	-	-	39,079,920.00	
	PEMBIAYAAN NETTO	62,301,677,871.17	155,904,418,032.34	198,630,729,304.55	384,311,148,383.61	223,996,777,512.58	95,443,817,524.40	34.40%
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN	167,061,915,280.34	209,581,493,638.55	396,607,764,805.61	214,875,906,410.58	117,161,445,444.40	75,692,020,540.19	-2.40%

Sumber : BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018

Surplus/defisit menunjukkan selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Jika pendapatan lebih besar daripada belanja, maka terjadi surplus, kalau sebaliknya maka terjadi defisit. Besaran defisit menunjukkan tingkat belanja yang tidak dapat dipenuhi oleh pendapatan daerah. Dalam Kurun tahun 2013-2018 defisit terjadi pada tahun 2016-2018, sedangkan surplus terjadi pada tahun 2013-2015. Ada kecenderungan peningkatan surplus APBD dari sebesar Rp. 104.760.237.409,17,- pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp. 197.977.035.501,06,- pada tahun 2015.

Selengkapnya Grafik Selisih Pendapatan dan Belanja Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada gambar 3.10 berikut:



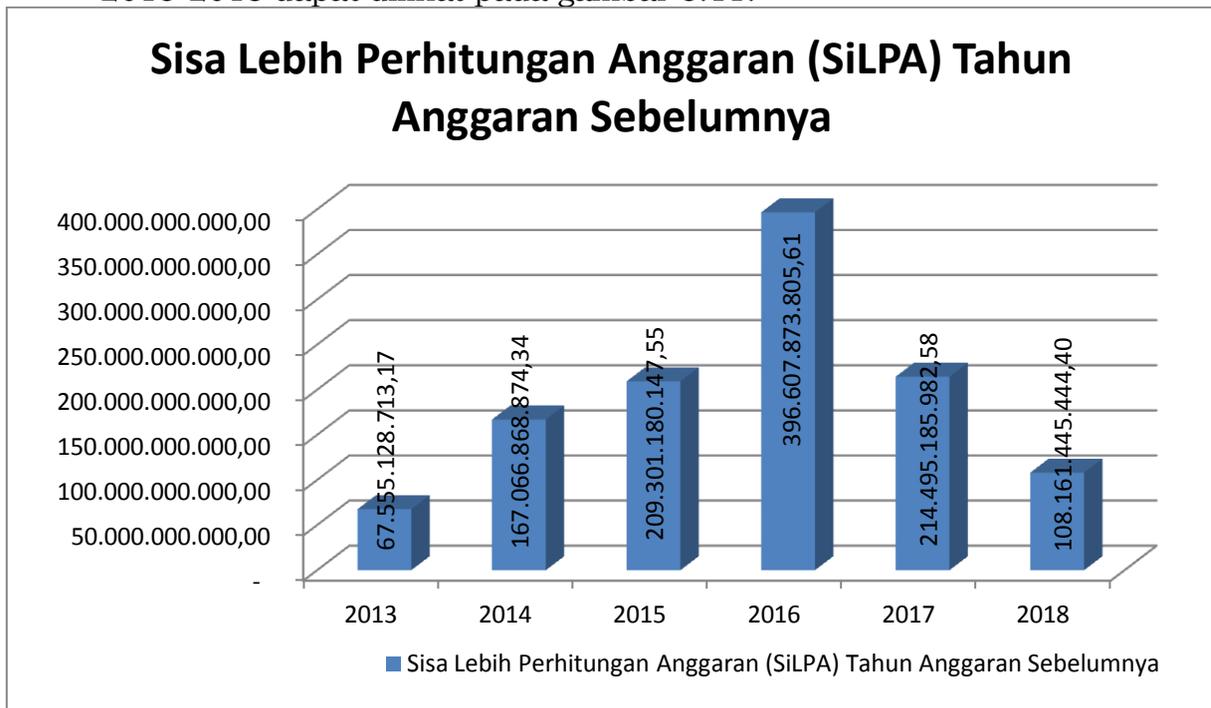
Grafik 3.10
Selisih Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 (Rp.)

Sumber : BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018

Pelampauan Pendapatan atau penghematan belanja pada realisasi APBD sebelumnya akan menghasilkan sisa dana. Sisa dana tersebut dinamakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang disingkat SiLPA. Namun demikian, mengingat bahwa APBD dibuat sebelum berakhirnya tahun anggaran maka SiLPA yang terdapat di APBD merupakan nilai estimasi.

Semakin besar SiLPA pada dasarnya menunjukkan semakin besarnya dana publik yang belum atau tidak digunakan dalam belanja atau pengeluaran pembiayaan lain sehingga mengendap di kas daerah sebagai dana idle. Kondisi yang terjadi di Kabupaten Rembang selama periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan bahwa pada tahun 2013 terdapat SiLPA sebesar Rp. 67.523.259.013,17,- dan meningkat pada tahun 2018 menjadi Rp. 108.161.445.444,40,- Kondisi ini menunjukkan bahwa secara rata-rata selama enam tahun terakhir terjadi pertumbuhan SiLPA sebesar 33,32%. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Rembang masih banyak dana publik yang belum digunakan dalam belanja maupun pengeluaran yang lain. Sehingga masih ada dana yang mengendap di kas daerah atau tidak terserap.

Grafik Besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada gambar 3.11.



Grafik 3.11
Besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Tahun 2013-2018(Rp)

Sumber : BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018

Besarnya SILPA Tahun Berkenaan pada akhir tahun tentunya menjadi salah satu sumber pembiayaan pada tahun berikutnya untuk mendanai belanja daerah. Rasio ini diharapkan akan semakin turun mengingat tingginya SILPA Tahun Berkenaan yang terjadi bisa ditengarai oleh karena rendahnya penyerapan belanja daerah, yang pada dasarnya mengindikasikan kurang efisien dan efektifnya perencanaan kegiatan. Sumber SILPA Tahun Berkenaan selain itu adalah adanya dana dari pusat yang tidak terserap. Sehingga rasio ini juga perlu dicermati oleh pemerintah pusat dalam melakukan kebijakan transfer ke daerah yang efisien dan efektif.

Kondisi yang terjadi di Kabupaten Rembang menunjukkan bahwa Rasio SILPA Tahun Berkenaan terhadap Anggaran Belanja fluktuatif. Dengan kondisi ini maka dapat disampaikan bahwa terjadi penyerapan belanja yang kurang optimal dari tahun 2013 hingga tahun 2018. Meningkatnya rasio SILPA Tahun Berkenaan terhadap anggaran belanja ini menyebabkan Pemerintah Kabupaten Rembang harus siap dalam membiayai belanjanya. Grafik Rasio SILPA Tahun Berkenaan terhadap belanja tahun 2013-2018 dapat dilihat terlihat pada gambar 3.12 di bawah ini:



Grafik 3.12
Rasio SiLPA terhadap Anggaran Belanja
Tahun 2013-2018 (%)

Sumber : BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018

Kemampuan keuangan daerah tentu saja tercermin dari seluruh penerimaan daerah baik pendapatan APBD dan penerimaan pembiayaan, yang seharusnya bisa mencukupi untuk digunakan dalam mendanai seluruh belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan. Gambar 3.13 menunjukkan bahwa rasio kemampuan Kabupaten Rembang mendanai belanja daerah selama enam tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2013 terjadi surplus sebesar 9,88%, pada tahun 2016 mulai terjadi defisit sebesar 9,77% dan pada tahun 2018 terjadi defisit sebesar 1,09%.

Namun demikian secara rata-rata dari Tahun 2013-2018 Rasio Kemampuan Kabupaten Rembang dalam mendanai Belanja Daerah masih surplus sebesar 2,27%.

Grafik Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada gambar 3.13 berikut:



Grafik 3.13
Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah
Tahun 2013-2018(%)

Sumber : BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018

3.1.2. Neraca Daerah

Gambaran tentang posisi keuangan daerah berupa aset, kewajiban dan ekuitas dana tertuang dalam Neraca Daerah. Laporan Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang wajib dibuat oleh pemerintah daerah. Neraca Daerah mempunyai fungsi sebagai alat manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah. Analisis Neraca Daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Gambaran neraca daerah Kabupaten Rembang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4.
Neraca Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018 Unaudited
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ASET	1,720,547,288,999.81	1,450,840,887,158.30	1,632,557,326,614.45	1,799,809,861,544.76	1,699,744,280,051.09	1,968,165,614,970.41
1.1	ASET LANCAR	204,738,774,831.69	233,956,464,422.83	428,810,406,991.65	251,807,596,007.98	165,782,551,429.16	139,294,327,401.79
1.1.1	Kas	167,186,629,790.34	199,588,570,530.55	388,577,907,010.61	216,326,775,373.58	117,163,608,804.40	75,423,575,248.19
1.1.2	Investasi Jangka Pendek	-	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	-	-	-
1.1.3	Piutang Pajak dan Retribusi	18,870,899,017.00	5,248,387,153.53	5,100,006,106.90	3,267,254,902.27	6,303,695,143.93	13,203,667,921.77
1.1.4	Piutang Dana Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-
1.1.5	Piutang Lainnya	10,692,439,751.83	1,159,489,466.25	884,707,385.45	313,622,592.50	1,017,741,666.00	1,023,080,180.14
1.1.6	Penyisihan Piutang	-	7,951,221,736.04	11,296,479,912.31	15,759,397,110.50	23,798,368,120.49	33,015,965,912.59
1.1.7	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	-
1.1.8	Beban Dibayar Dimuka	299,690,887.12	366,968,797.24	143,453,211.44	158,041,882.44	34,792,876.21	150,967,733.05
1.1.9	Persediaan	7,689,115,385.40	9,641,826,739.22	12,807,853,364.94	15,982,504,146.69	17,464,344,818.13	16,477,070,406.05
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	60,169,735,278.12	77,842,155,672.75	92,758,541,479.61	111,960,651,436.44	122,554,385,567.37	133,906,740,820.87
1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	3,221,157,177.00	3,221,157,177.00	3,221,157,177.00	3,221,157,177.00	3,221,157,177.00	2,538,888,320.00
1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	56,948,578,101.12	74,620,998,495.75	89,537,384,302.61	108,739,494,259.44	119,333,228,390.37	131,367,852,500.87
1.3	ASET TETAP	1,433,385,135,718.00	1,116,135,722,538.72	1,087,049,287,902.19	1,405,833,671,818.65	1,380,362,930,754.66	1,605,766,345,508.22
1.3.1	Tanah	140,402,081,758.00	250,814,959,708.00	250,814,959,708.00	263,145,115,908.00	281,687,526,125.00	231,400,719,485.00
1.3.2	Peralatan dan Mesin	225,453,122,372.00	248,289,944,682.50	275,523,105,697.28	309,114,005,321.08	352,394,182,719.87	380,854,499,849.53
1.3.3	Gedung dan Bangunan	400,474,125,644.00	443,559,645,670.00	450,977,211,621.22	576,928,698,661.42	679,120,962,967.61	722,431,257,971.61
1.3.4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	612,710,025,493.00	691,612,662,174.00	704,407,543,123.00	880,239,900,523.00	1,058,220,140,070.00	1,084,492,825,378.00
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	49,586,780,451.00	55,287,097,954.00	57,964,262,191.00	59,370,886,427.00	67,931,644,685.00	56,826,686,595.08
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	4,759,000,000.00	4,759,000,000.00	4,955,950,750.00	512,336,000.00	614,277,300.00	32,923,391,761.00
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	-	(578,187,587,649.78)	(657,593,745,188.31)	(683,477,271,021.85)	(1,059,605,803,112.82)	(903,163,035,532.00)
1.4	DANA CADANGAN	-	-	-	-	-	-
1.4.1	Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018 Unaudited

1	2	3	4	5	6	7	8
1.5	ASET LAINNYA	22,253,643,172.00	22,906,544,524.00	23,939,090,241.00	30,207,942,281.69	31,044,412,299.90	89,198,201,239.53
1.5.1	Tagihan Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
1.5.2	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-	-
1.5.3	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2,995,405,000.00	2,995,405,000.00	2,995,405,000.00	2,995,405,000.00	2,995,405,000.00	3,272,269,623.00
1.5.4	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	2,978,202,500.00	2,978,202,500.00	2,978,202,500.00	2,978,202,500.00	2,978,202,500.00	-
1.5.5	Aset Tidak Berwujud	3,484,490,234.00	3,930,230,657.00	3,965,230,657.00	1,339,506,112.69	1,093,681,693.40	1,247,867,554.56
1.5.6	Aset Lain-lain	12,795,545,438.00	13,002,706,367.00	14,000,252,084.00	22,894,828,669.00	23,977,123,106.50	84,678,064,061.97
1.5.7	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	-	-	-	-	-	-
2	KEWAJIBAN	26,271,878,264.91	29,535,045,722.93	21,077,397,345.77	14,549,067,299.67	38,778,353,764.93	57,702,152,300.27
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	26,188,491,981.68	29,506,715,291.70	21,077,397,345.77	13,292,228,598.67	23,018,371,084.93	46,097,087,620.27
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	-	3,816,018.00	5,075,660.00	-	2,163,360.00	8,419,331.00
2.1.2	Utang Bunga	-	7,972,714.25	-	-	-	-
2.1.3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	74,158,961.00	53,450,839.75	28,330,427.98	-	1,969,998,000.00	3,868,368,000.00
2.1.4	Pendapatan Diterima Dimuka	-	621,746,256.86	1,098,904,321.38	1,611,315,926.01	1,358,495,277.93	1,089,557,125.55
2.1.5	Utang Beban	-	2,790,849,552.00	2,609,487,608.92	1,288,871,930.00	1,380,927,435.00	1,697,796,357.00
2.1.6	Utang kepada pihak ketiga	26,114,333,020.68	26,028,879,910.84	17,335,599,327.49	10,392,040,742.66	18,306,787,012.00	39,432,946,806.72
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	83,386,283.23	28,330,431.23	-	1,256,838,701.00	15,759,982,680.00	11,605,064,680.00
2.2.1	Utang Dalam Negeri	-	-	-	-	15,759,982,680.00	11,605,064,680.00
2.2.2	Utang Luar Negeri	83,386,283.23	28,330,431.23	-	1,256,838,701.00	-	-
3	EKUITAS	1,694,275,410,734.90	1,421,305,841,435.37	1,611,479,929,268.68	1,785,260,794,245.09	1,660,965,926,286.16	1,910,463,462,670.14
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1,720,547,288,999.81	1,450,840,887,158.30	1,632,557,326,614.45	1,799,809,861,544.76	1,699,744,280,051.09	1,968,165,614,970.41

Sumber: BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018

Berdasarkan neraca daerah tersebut di atas, dapat diperoleh beberapa informasi berkaitan dengan beberapa hal yaitu rasio lancar, rasio cair (quick rasio), rasio total hutang terhadap aset dan rasio hutang terhadap modal. Uraian masing-masing rasio adalah sebagai berikut:

a. Rasio Lancar

Rasio lancar merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang dimilikinya.

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Kas}}{\text{Hutang Jangka Pendek}}$$

(*Current Ratio*)

b. Rasio Cair

Rasio Cair (*Quick Ratio*) dihitung dengan mengurangi persediaan dari aset lancar, dan hasilnya dibagi dengan hutang jangka pendek. Biasanya aset lancar terdiri atas kas di kas daerah, kas di pemegang kas bagian lancar tagihan penjualan/penerimaan, bagian lancar pinjaman, bagian lancar TPTGR, piutang pajak, piutang lain-lain dan persediaan. Persediaan merupakan unsur aset lancar yang paling tidak likuid sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan.

$$\text{Rasio Cair} = \frac{\text{(Aset Lancar - Persediaan)}}{\text{Hutang Jangka Pendek}}$$

(*Quick Ratio*)

c. Rasio Hutang terhadap Aset (*Debt Ratio*)

Rasio hutang terhadap aset adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya menggunakan aset yang dimilikinya. Rasio hutang terhadap total aset dihitung dengan membandingkan total hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan total aset. Kewajiban tersebut terdiri dari Hutang pada pihak ketiga, Hutang Luar Negeri, Hutang pada Pemerintah Pusat dan Hutang Bunga. Analisis ini bertujuan mengukur persentase jumlah dana yang berasal dari kreditor/donatur/pihak ketiga dalam membiayai pembangunan.

$$\text{Rasio Hutang Terhadap Aset} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aset}}$$

(*Debt Ratio*)

d. Rasio Hutang terhadap Modal

Rasio hutang terhadap Modal adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya menggunakan modal yang dimilikinya. Rasio hutang terhadap modal dihitung dengan membandingkan total hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan jumlah modal. Kewajiban tersebut terdiri dari Hutang pada pihak ketiga, Hutang Luar Negeri, Hutang pada Pemerintah Pusat dan Hutang Bunga.

$$\text{Rasio Hutang Terhadap Modal} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Tabel 3.5.
Perkembangan Penghitungan Neraca Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018

No	Uraian	Tahun						R
		2013	2014	2015	2016	2017	2018 Unaudited	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Rasio Likuiditas							
1	Rasio Lancar (Kas/Hutang Jangka Pendek)	6,38	6,76	18,44	16,27	5,09	1,64	9,10
2	Rasio Cair ((Aset Lancar-Persediaan)/Hutang Jangka Pendek)	7,52	7,60	19,74	17,74	6,44	2,66	10,29
B	Rasio Solvabilitas							
1	Rasio Hutang Terhadap Aset (Debt Ratio) (Total Kewajiban/Total Aset)	0,015	0,020	0,013	0,008	0,023	0,029	0,02
2	Rasio Hutang Terhadap Modal	0,016	0,021	0,013	0,008	0,023	0,030	0,02

Sumber : BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun2018(data diolah)

Dari Tabel 3.5 di atas secara ringkas dapat dilakukan analisis atas kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang sebagai berikut:

- a. Rasio Lancar (*Current Ratio*) fluktuatif dari tahun 2013 sebesar 6,38 menjadi 1,64 pada tahun 2018 dengan rata-rata Rasio Lancar (*Current Ratio*) sebesar 9,10. Hal ini mengindasikan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang dimilikinya cukup baik, karena Pemerintah Kabupaten Rembang menerapkan kebijakan pinjaman daerah dilakukan dengan sangat hati-hati.
- b. Rasio Cair (*Quick Ratio*) fluktuatif pada tahun 2013 sebesar 7,52 menjadi sebesar 2,66 pada tahun 2018 dengan rata-rata Rasio Cair (*Quick Ratio*) sebesar 10,29. Hal ini menunjukkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam menggunakan aktiva lancar untuk menutupi utang lancarnya dalam kondisi baik karena berada diatas angka 1. Idealnya, rasio lancar berada pada angka 1:1 atau minimal 0,8:1 karena apabila kurang dari itu, pemerintah daerah dianggap memiliki masalah keuangan.
- c. Rasio Hutang terhadap Aset (*Debt Ratio*) Pemerintah Kabupaten Rembang cenderung rendah sejak tahun 2013 hingga tahun 2018, yaitu sebesar 0,015 pada tahun 2013 dan naik menjadi 0,029 pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa solvabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam keadaan yang sehat, yaitu persentase jumlah dana yang berasal dari kreditor/donatur/pihak ketiga dalam membiayai pembangunan adalah rendah.
- d. Rasio Hutang terhadap Modal Pemerintah Kabupaten Rembang cenderung rendah sejak tahun 2013 hingga tahun 2018, yaitu sebesar 0,016 pada tahun 2013 dan naik menjadi 0,030 pada tahun 2018. Hal tersebut berarti bahwa jumlah dana yang disediakan dalam

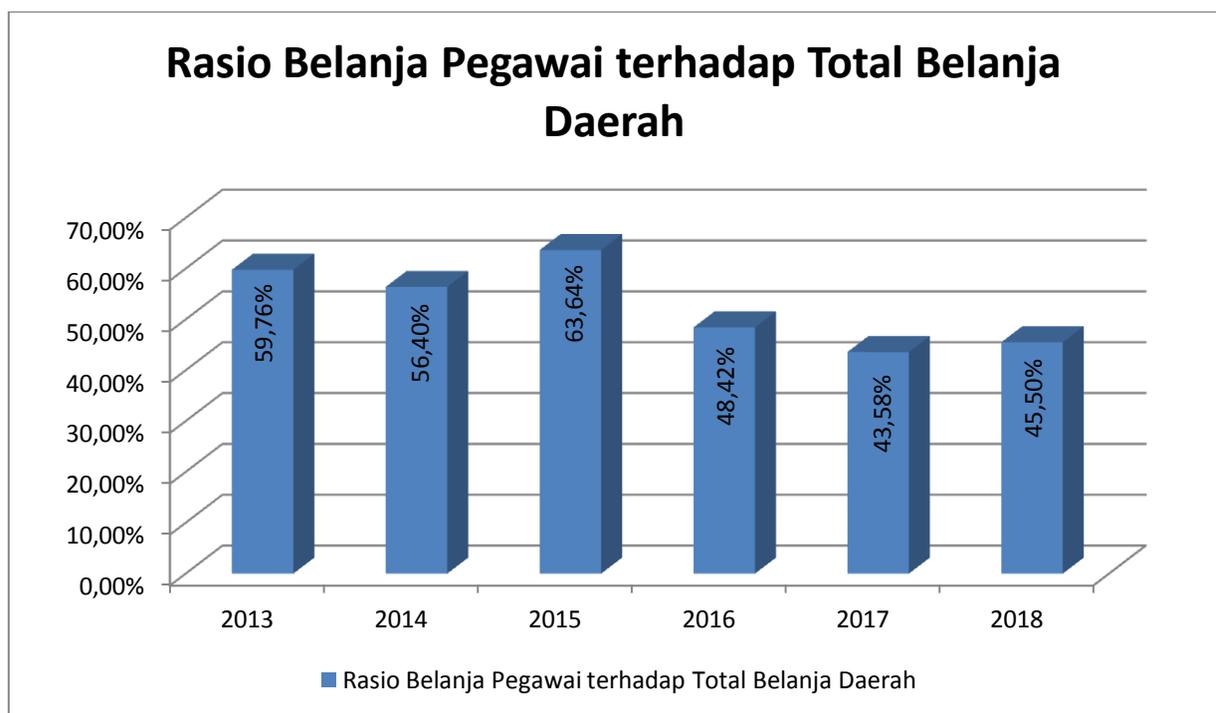
membayai pembangunan sebagian besar bersumber dari kemampuan keuangan sendiri, bukan berasal dari pinjaman kreditor/donatur/pihak ketiga.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2013-2018

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah masa lalu juga dapat dilihat dari proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah. Tujuan penghitungan rasio Belanja Pegawai terhadap total Belanja Daerah adalah untuk mengetahui proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah. Data Belanja Pegawai di sini adalah penjumlahan dari Belanja Pegawai Langsung dan Belanja Pegawai Tidak Langsung. Rasio ini menggambarkan bahwa semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil angka rasio Belanja Pegawai maka semakin kecil proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai.

Grafik Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah Tahun 2013-2018 seperti diperlihatkan oleh gambar 3.14 berikut ini.



Grafik 3.14
Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah Tahun 2013-2018 (%)

Sumber : BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018

Kondisi yang terjadi di Kabupaten Rembang menunjukkan bahwa selama enam tahun terakhir Rasio Belanja Pegawai terhadap Belanja Daerah cenderung menurun. Dengan demikian maka kabupaten Rembang mempunyai kesempatan dalam mendorong roda perekonomian melalui perbaikan dan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

Salah satu ukuran kualitas belanja yang baik adalah dengan semakin besarnya porsi Belanja Langsung terhadap total belanja daerah. Belanja Langsung yang besar diharapkan akan memberikan dampak yang

positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah dan pada akhirnya akan meningkatkan potensipenerimaan daerah yang baru. Rasio Belanja Langsung terhadap total belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk pembangunan daerah. Belanja Langsung, merupakan belanja pemerintah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah selain dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri, oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya, semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin buruk pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Perkembangan Analisis belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6.

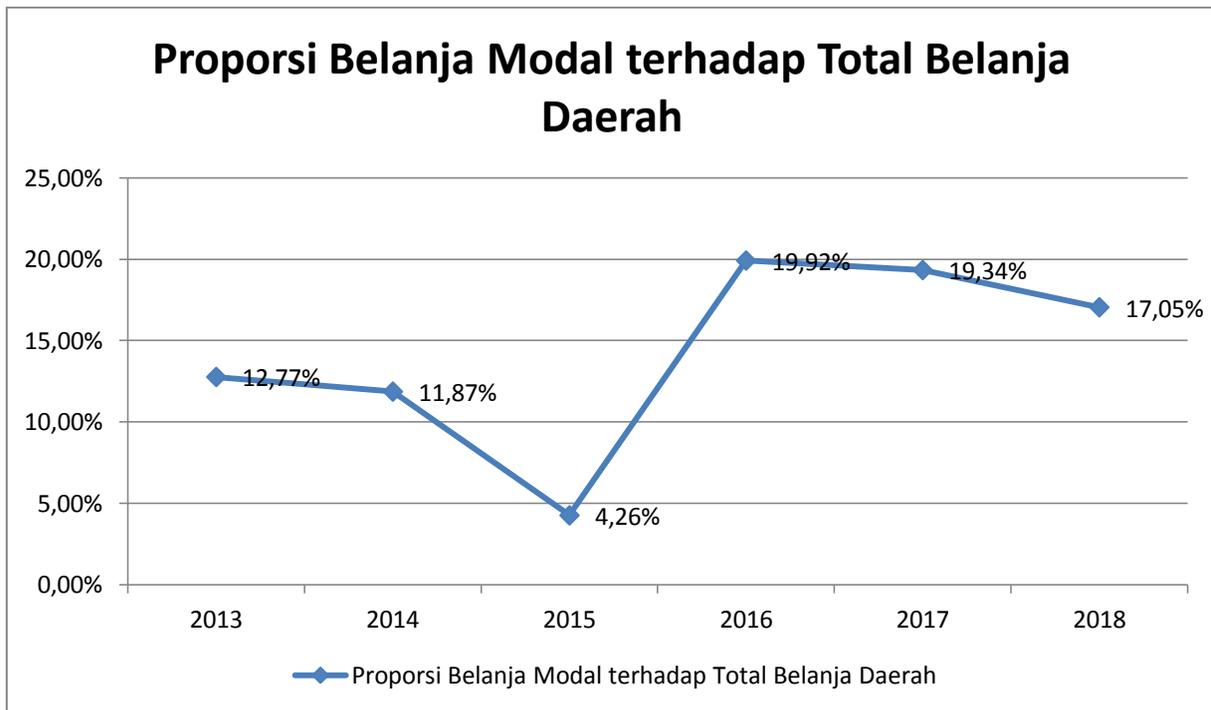
Perkembangan Analisis Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018 Unaudited
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Total Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	633,882,810,761.00	719,609,667,619.00	775,602,699,734.00	839,766,248,987.00	797,129,312,468.00	825,668,358,529.16
2	Total Belanja Daerah	1,060,672,838,714.84	1,275,910,680,987.06	1,218,804,775,992.74	1,734,304,081,928.58	1,829,088,241,098.22	1,814,662,872,214.36
3	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	59.76%	56.40%	63.64%	48.42%	43.58%	45.50%

Sumber : BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018

Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah mencerminkan porsi Belanja Daerah yang dibelanjakan untuk membiayai Belanja Modal. Belanja Modal ditambah belanja barang dan jasa merupakan belanja pemerintah daerah yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, di samping pengaruh dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Realisasi Belanja Modal akan memiliki *multiplier effect* dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya, diharapkan akan semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin berkurang pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Grafik Proporsi Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Rembang tahun 2013-2018 terlihat pada grafik 3.15 berikut:



Grafik 3.15
Proporsi Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012-2018(%)

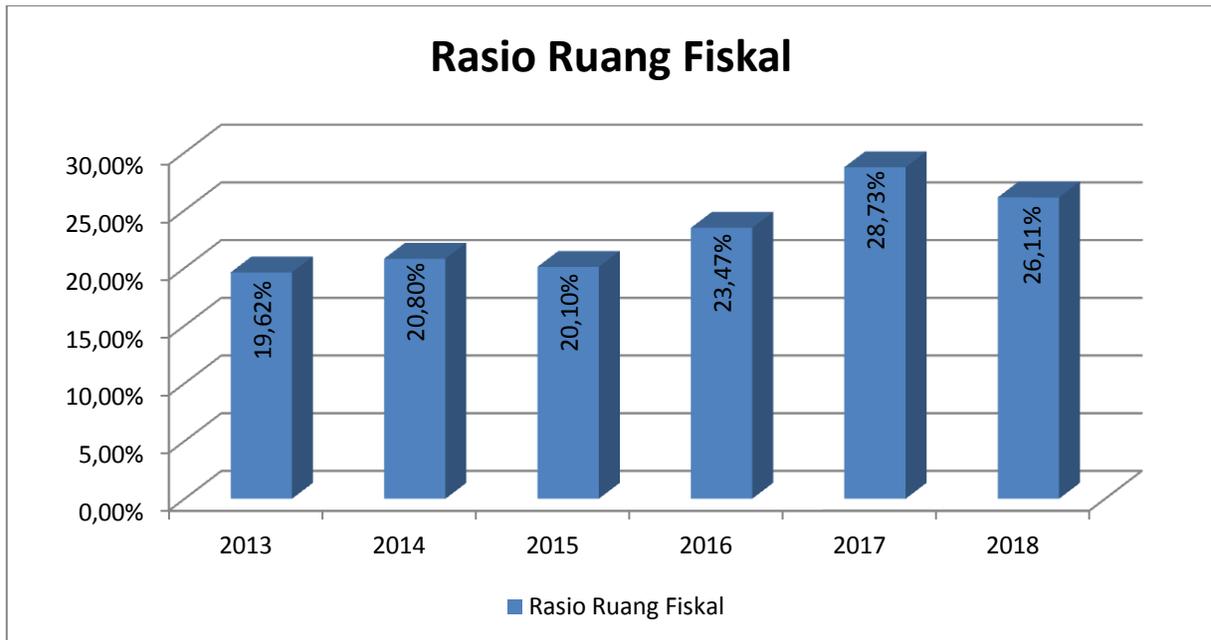
Sumber: BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018 (data diolah)

Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu juga dapat dilihat dari ruang fiskal. Peter Heller dalam tulisan yang dipublikasikan IMF memberikan definisi bahwa ruang fiskal adalah ruang dalam anggaran pemerintah yang memungkinkan pemerintah untuk menyediakan sumberdaya untuk suatu tujuan tanpa membahayakan kesinambungan posisi keuangan atau stabilisasi ekonomi negara (daerah). Dari definisi di atas tampak bahwa ruang fiskal adalah “sisa” setelah rencana pengeluaran pemerintah dirinci dan diputuskan.

Ruang fiskal (*fiscal space*) merupakan suatu konsep untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Semakin besar ruang fiskal yang dimiliki suatu daerah maka akan semakin besar pula fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanjanya pada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas daerah seperti pembangunan infrastruktur daerah. Perhitungan ruang fiskal daerah, yaitu total Pendapatan Daerah dikurangi dengan Pendapatan Hibah, pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (*earmarked*), dan belanja yang sifatnya mengikat, yaitu Belanja Pegawai dan Belanja Bunga, kemudian dibagi dengan total pendapatannya.

Indikator ini pada dasarnya menunjukkan seberapa besar ruang fiskal atau keleluasaan yang dimiliki daerah dalam menggunakan dananya secara bebas dalam menentukan prioritas belanja yang akan didanai. Ukuran ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagian besar pendapatan daerah harus dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak bisa dihindari, seperti gaji PNS, dan selain itu terdapat berbagai jenis pendapatan yang bersifat *earmarked* (ditentukan penggunaannya). Ruang fiskal diperoleh dari pendapatan setelah dikurangi pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (*earmarked*) serta belanja yang sifatnya mengikat seperti belanja pegawai dan belanja bunga. Semakin

besar dana yang masih bisa digunakan secara bebas oleh daerah ditunjukkan dengan Ruang Fiskal yang semakin besar. Grafik Rasio Ruang Fiskal Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada gambar 3.16 berikut:



Grafik 3.16
Rasio Ruang Fiskal
Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 (%)

Sumber : BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018

Berdasarkan Gambar 3.16 terlihat bahwa ruang fiskal di Kabupaten Rembang juga mengalami peningkatan selama enam tahun terakhir. Pada tahun 2013 ruang fiskal yang tersedia sebesar 19,62% dari total Pendapatan meningkat pada tahun 2018 ruang fiskal di Kabupaten Rembang telah mampu mencapai sebesar 26,11% dari total pendapatan. Tentu saja kondisi ini sangat dipengaruhi dengan semakin meningkatnya Pendapatan Asli Daerah selama enam tahun terakhir.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan pendanaan pembangunan daerah diluar kapasitas pendapat daerah serta kewajiban-kewajiban yang menjadi beban pemerintah daerah. Analisis pembiayaan daerah tidak dapat terlepas dari kondisi defisit yang terjadi dalam APBD sehingga diperlukan pendanaan dari penerimaan pembiayaan daerah. Defisit riil dalam APBD terjadi apabila pendapatan daerah dikurangi dengan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah menimbulkan adanya defisit dalam APBD. Kondisi defisit riil APBD Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7.

Defisit Riil Anggaran Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018 Unaudited
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1,165,433,076,124.01	1,329,587,756,593.27	1,416,781,811,493.80	1,564,868,839,955.55	1,722,252,909,030.04	1,794,911,075,230.15
2	Realisasi Belanja Daerah	1,060,672,838,714.84	1,275,910,680,987.06	1,218,804,775,992.74	1,734,304,081,928.58	1,829,088,241,098.22	1,814,662,872,214.36
3	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah	5,253,450,842.00	11,162,450,842.00	10,670,450,843.00	12,296,725,422.00	8,228,389,150.00	12,717,627,920.00
4	Defisit riil	99,506,786,567.17	42,514,624,764.21	187,306,584,658.06	(181,731,967,395.03)	(115,063,721,218.18)	(32,469,424,904.21)

Sumber : BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018 (data diolah)

Tabel 3.8.

Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018 Unaudited
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	67,555,128,713.17	167,066,868,874.34	209,301,180,147.55	396,607,873,805.61	214,495,185,982.58	108,161,445,444.40
2	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	17,729,980,680.00	-

Sumber : BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018 (data diolah)

Besarnya SILPA pada akhir tahun menjadi salah satu sumber pembiayaan pada tahun berikutnya untuk mendanai belanja daerah. Rasio SILPA terhadap total belanja daerah diharapkan akan semakin turun mengingat tingginya SILPA yang terjadi bisa menunjukkan rendahnya penyerapan belanja daerah. Namun demikian, besarnya SILPA juga disebabkan adanya dana dari pusat yang bersifat *earmark* dan tidak dapat terserap pada akhir tahun anggaran dan sisa saldo kas pada BLUD. Rasio SILPA terhadap total belanja di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 mencapai rasio tertinggi pada tahun 2015, dengan kontribusi sebesar 32,54%. Secara umum rasio dan kontribusi SILPA terhadap Total Belanja Daerah fluktuatif. Rasio/Kontribusi SILPA terhadap Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel 3.9.

Tabel 3.9.
Rasio/Kontribusi SILPA terhadap Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018

Tahun	SILPA	Total Belanja	Rasio SILPA terhadap Belanja Daerah
2013	167,061,915,280.34	1,060,672,838,714.84	15.75%
2014	209,581,493,638.55	1,275,910,680,987.06	16.43%
2015	396,607,764,805.61	1,218,804,775,992.74	32.54%
2016	214,875,906,410.58	1,734,304,081,928.58	12.39%
2017	117,161,445,444.40	1,829,088,241,098.22	6.41%
2018 Unaudited	75,692,020,540.19	1,814,662,872,214.36	4.17%

Sumber : BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018 (data diolah)